

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA
PABBENTENGANG KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA**

S K R I P S I



YUSRINA RAHMADHANI

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA
PABBENTENGANG KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA**

S K R I P S I

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik**

**YUSRINA RAHMADHANI
1265542014**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor : 2625/UN36.6/DL/2016 Tanggal 01 Juni 2016.

Untuk membimbing saudara :

Nama : Yusrina Rahmadhani

Nomor Stambuk : 1265542014

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentengang
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan dapat diajukan di depan Panitia
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Makassar.

Makassar, September 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si
NIP. 19571231 198103 1 039

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si
NIP. 19601231 198803 1 011

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan SK Dekan No. 5655/UN36.6/KM/2016 tanggal 30 September 2016. Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.A.P) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pada Hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016.

Disahkan Oleh,

 Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar


Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum.
NIP. 19671231 199303 1 016

Panitia Ujian :

1. Ketua : Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum. (.....)
2. Sekretaris : Dr. Muh. Nur Yamin, M.Si (.....)
3. Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si (.....)
4. Pembimbing II : Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si (.....)
5. Penguji I : Dr. Risma Niswaty, SS., M.Si (.....)
6. Penguji II : Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si (.....)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Yusrina Rahmadhani
NIM : 1265542014
Tempat/ Tgl Lahir : Limbung, 17 Februari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentengang
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Dengan pembimbing masing-masing :

1. Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si
2. Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsure ciplakan/plagiat.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya siap dituntut didalam maupun diluar pengadilan dan menanggung resiko yang diakibatkannya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, September 2016

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

Yang Membuat Pernyataan

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si
NIP. 19601231 198803 1 011

Yusrina Rahmadhani
NIM. 1265542014

MOTO

Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan.

(Robert F. Kennedy)

Tidak semua kerja keras mencapai tujuan,
tetapi tidak ada tujuan yang tercapai tanpa kerja keras.

(Yusrina Rahmadhani)

**Karya ini kupersembahkan untuk
Ayahanda dan Ibunda tercinta serta
Keluarga besarku atas segala kasih sayang,
do'a dan pengorbanannya yang tulus demi
kebahagiaan dan keberhasilan Dunia Akhirat.**

ABSTRAK

Yusrina Rahmadhani. 2016. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh H. Fakhri Kahar dan H. Muhammad Guntur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa di lihat dari tiga tahap penelitian yaitu (1) tahap perencanaan sudah dapat dikatakan efektif, (2) tahap pelaksanaan belum efektif, dan (3) tahap pengawasan juga belum bisa dikatakan efektif karena kurangnya SDM yang dimiliki oleh anggota BPD itu sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu : Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian, Bab II tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Tinjauan pustaka terdiri dari pengertian peran, BPD, pengertian perencanaan, pengertian pembangunan, konsep perencanaan pembangunan, dan pentingnya perencanaan dalam pembangunan, sedangkan kerangka konseptual terdiri dari bagan kerangka. Bab III metode penelitian, terdiri pendekatan & jenis penelitian, lokasi penelitian, tahap-tahap kegiatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Bab V penutup terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan akan tetapi dengan usaha yang semaksimal mungkin dan dukungan dari berbagai pihak sehingga segala

hambatan dalam penyusunan skripsi ini dapat teratasi. Oleh karena itu melalui skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Husain Syam, M.Tp, Rektor Universitas Negeri Makassar periode 2016-2020 beserta staf atas segala bentuk pelayanannya.
2. Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan izin dan persetujuan mengadakan penelitian.
3. Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Yang sekaligus pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si, Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Yang sekaligus penguji kedua yang telah memberikan petunjuk dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si, sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran dan ketekunan dalam membimbing dan mengarahkan penulis sejak dari penyusunan proposal penelitian skripsi sampai penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Risma Niswaty, SS, M.Si, penguji pertama yang telah memberikan petunjuk dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.

7. Para dosen, staf Prodi Ilmu Administrasi Negara dan staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang telah mendidik dan memberi pelayanan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah selau pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin penelitian.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dan Bapak Camat Bajeng yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
10. Kepala Desa, staf, masyarakat, dan anggota BPD Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, yang telah memberikan izin untuk penelitian dan kesediannya untuk meberikan data dan informasi.
11. Kedua orang tua tercinta ayahanda H. Muhtar Muhsin, S.Pd, M.Si dan ibunda Hj. Hafiah S.Pdi, kakanda Yusran dan Yusriana, serta Zulfikar yang telah memberikan kasih sayang , doa, motivasi, bimbingan, dan kerja sama demi kesuksesan, cita-cita dan harapan masa depan penulis.
12. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar angkatan 2012, terkhusus Hamriani, Ririn, Riska dan Sri Melawati terima kasih sudah setia menemani penulis selama 4 tahun ini.

Harapan penulis semoga segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang memudahkan penyelesaian skripsi ini, bernilai ibadah dan senantiasa mendapat taufiq dan hidayah dari Allah Subhana wa ta'ala, dan dijadikan sebagai hamba-Nya yang selalu bertaqwa. Amin

Makassar, September 2016

Yusrina Rahmadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Hasil Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	7
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Pengertian Peran	7

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	8
3. Pengertian Perencanaan	13
4. Pengertian Pembangunan	15
5. Konsep Perencanaan Pembangunan	16
6. Pentingnya Perencanaan dalam Pembangunan	19
B. Kerangka Konseptual.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	23
D. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian	24
E. Sumber Data	26
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
H. Pengecekan Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Penyajian Data Hasil Penelitian	37
C. Pembahasan	44
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Implikasi	47

C. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51
RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Susunan Anggota BPD	3

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Bagan Kerangka Konseptual	21
2.	Komponen dalam analisis data	31

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Matriks Penelitian	52
2.	Pedoman Wawancara	53
3.	Matriks Pedoman Wawancara	54
4.	Daftar Informan	55
5.	Matriks Data Hasil Wawancara	56
6.	Daftar hadir Musrenbangdes	63
7.	Berita acara Musrenbangdes (Hasil Musrenbang)	66
8.	Usulan Judul Skripsi	69
9.	Persetujuan Judul dan Calon Pembimbing	70
10.	Pengesahan Judul Skripsi dan Pembimbing	71
11.	Permintaan isin Melaksanakan Penelitian	72
12.	Izin Penelitian dari BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan	73
13.	Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa.	74
14.	Rekomendasi Penelitian dari Camat Bajeng Kab. Gowa	75
15.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	76
16.	UU No 6 Tahun 2014	77
17.	Dokumentasi	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan besar yang telah terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini terkait erat dengan semangat reformasi dan otonomi daerah yang bermaksud untuk mengurangi peran pemerintah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kondisi ini telah mendapat respon dari pemerintah dengan menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah tergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.¹

¹ UU No 32 Tahun 2004 tentang *Desa*

Tugas pembantuan bisa berasal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, bisa berasal dari provinsi saja, atau bisa berasal dari kabupaten/ kota saja. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota kepada desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penyelenggaraan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Jika tugas pembantuan tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, maka desa berhak menolak tugas pembantuan tersebut.

Salah satu keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat pada penyelenggaraan pembangunan desa. Penyelenggaraan pembangunan desa memerlukan struktur organisasi yang baik agar mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar di pertanggungjawabkan kebenarannya.

Pemerintah desa dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa, hendaknya tidak merencanakan sendiri perencanaan pembangunan tersebut tanpa melibatkan lembaga lain yang terkait. Lembaga yang paling berpengaruh untuk menampung aspirasi masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka pemerintahan desa harus bekerja sama dengan BPD dalam rangka menetapkan perencanaan pembangunan desa, serta harus mengikut sertakan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di Desa. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 8 yang menyebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.² BPD sebagai badan permusyawaratan berasal dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Adapun susunan anggota BPD Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Muhtar Muhsin	Ketua	Sunggumanai
2	Tayang R	Wakil Ketua	Palompong Timur
3	Abd. Rahman Ewa	Sekretaris	Palompong Timur
4	Syamsuddin Tinri	Anggota	Lanra-lanra
5	Salang Manja	Anggota	Sugitanga 1
6	Muhajir Ewa	Anggota	Sugitanga II
7	Kahar Muang	Anggota	Palompong Barat
8	Saldi Siajang	Anggota	Paukiri
9	Jabbar Rola	Anggota	Bukkangraki

Sumber : RPJMDesa Desa Pabbenteng

Palaguna mengemukakan bahwa fungsi BPD adalah :

- 1) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

² PP 72 Tahun 2005 tentang *Desa*

- 2) Legislasi, yaitu menyusun, merumuskan, dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.
- 3) Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, APBD, serta keputusan Kepala desa.
- 4) Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- 5) Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon kepala desa.
- 6) Menetapkan calon kepala desa dan kepala desa terpilih.³

Pada Peraturan Pemerintah dan pendapat Palaguna di atas, dapat diketahui bahwa peran BPD dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan desa sangat penting. Besar harapan masyarakat desa agar BPD dapat menjadi angin segar dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang berkedaulatan rakyat dan demokratis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Alvi Samsuria (2015) dengan judul “ Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Cina Kabupaten Bone” mengemukakan bahwa: 1) Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah efektif, 2) Kualitas layanan BPD sudah efektif, 3) Responsivitas BPD dalam menangani keluhan masyarakat sudah efektif, 4) Responsibilitas BPD bias dikatakan efektif, 5) Akuntabilitas BPD sudah efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Cina Kabupaten Bone sudah efektif.⁴

Selain itu, penelitian juga telah dilakukan oleh Syah Alam (2014) dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa

³ Palaguna.2002. *Orientasi Penguatan Otonomi Desa*. Makassar: Tim Pembina & Fasilitator penguatan OtonomiDesa Propinsi Sulawesi Selatan, hal 60

⁴ Alvi Samsuria.2015. *Efektifitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Cina Kabupaten Bone* .Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Hal 5

Mantang Lama Kecamatan Mantang (Studi kasus pada pembangunan pelantar masyarakat tahun 2012)” bahwa peran BPD dalam pembangunan di desa Mantang Lama dapat dikatakan sudah baik, hal ini terlihat dari jawaban informan (wawancara) terhadap peran BPD dalam pembangunan di Desa Mantang Lama. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat peran BPD dalam pembangunan di Desa Mantang Lama adalah masih kurangnya sarana dan prasarana bagi BPD serta masih terbatas dan kurangnya sumber daya manusia yang tersedia.⁵

BPD dituntut untuk selalu memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat dalam merencanakan dan membuat kebijakan pembangunan desa. Akan tetapi, hal tersebut sangat berbanding terbalik pada kenyataan dilapangan. Seperti dalam menjalankan fungsinya merancang dan menetapkan peraturan dan kebijakan masih dianggap sepihak tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Dalam bidang perencanaan pembangunan belum bisa menyusun perencanaan-perencanaan pembangunan yang baik dan benar serta yang penting dengan tidak penting.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian mengenai **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran Badan

⁵ Alam Syah. 2014. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan (Studi Pembangunan Pelantar Masyarakat Tahun 2012)*.Ejurnal Administrasi Negara. Hal 2

Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Searah dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi (data awal) bagi peneliti-peneliti yang lain untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa dan Anggota BPD Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan secara adil dan merata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Apabila seseorang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan suatu peran. Menurut Kamus Bahasa Indonesia “Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan dalam arti tertentu, peran merupakan seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut⁶.

Wibowo mengemukakan bahwa :

“*Roles* atau peran dimaksudkan sebagai serangkaian pola perilaku yang diharapkan dihubungkan pada seseorang yang menguasai posisi tertentu dalam unit sosial, tetapi kita perlu memainkan sejumlah peran yang berbeda baik di dalam maupun di luar pekerjaan”.⁷

Peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/ diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwasanya peranan merupakan suatu pola tindakan yang dilakukan orang-orang tertentu baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2014. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 449

⁷ Wibowo. 2014. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 207-208

peristiwa. Pada hakikatnya peranan merupakan suatu fungsi atau status pada orang-orang tertentu dalam menjalankan fungsinya seperti halnya dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan social budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Widjaja mengemukakan bahwa :

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat”.⁹

Menurut Soenardjo :

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan

⁸ UU No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

⁹ Widjaja. 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 3

keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.¹⁰

Menurut Bintoro “Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis social ekonomis, politis, dan cultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain”.¹¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang dialami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin dan mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia, selain itu desa diharapkan mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa sehingga akan menghasilkan masyarakat desa yang mandiri.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya

¹⁰Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:PT Penerbit Erlangga, hal 4

¹¹ Ibid.p.4

adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.¹²

BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/ kota dan atau pihak ketiga dapat mengikutsertakan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa, pemerintah mendorong terbentuknya organisasi lain seperti Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Selain itu, dapat juga

¹²Op.cit

dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Palaguna mengemukakan bahwa tugas pokok BPD yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan dan menjaga kelestarian adat istiadat
- 2) Berdasarkan inisiatif sendiri dan atau bersama-sama pemerintah desa membuat peraturan desa
- 3) Mengesahkan peraturan desa
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dan pelaksanaan pemerintahan desa
- 5) Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 6) Melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Kepala desa.¹³

Tugas BPD diharapkan lebih bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat desa. Kemungkinan besar segala tugas utamanya dapat dilaksanakan dengan baik mengingat keanggotaannya dipilih dari dan oleh masyarakat dan pemimpinnya dipilih oleh anggotanya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 mengemukakan bahwa fungsi BPD adalah:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹⁴

Hak anggota BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 yaitu :

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dan fungsinya dari Anggaran pendapatan dan belanja Desa.¹⁵

¹³ Palaguna. Op.cit.p.69-70

¹⁴ UU No. 6 Tahun 2014

Selain itu, hak anggota BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 pasal 62 yaitu :

- 1) Mengajukan usul rancangan peraturan desa
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat
- 4) Memilih dan dipilih
- 5) Memperoleh tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.¹⁶

Anggota BPD mempunyai kewajiban, menurut Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 pasal 63 adalah :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- 3) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- 4) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 5) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
- 6) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.¹⁷

Wewenang anggota BPD dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005

pasal 35 :

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 6) Menyusun tata tertib BPD.¹⁸

¹⁵ ibid

¹⁶ ibid

¹⁷ ibid

¹⁸ UU. Op.cit

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 64, Anggota BPD dilarang :

- 1) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa.
- 2) Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 3) Menyalahgunakan wewenang.
- 4) Melanggar sumpah/ janji jabatan.
- 5) Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa
- 6) Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Sebagai pelaksana proyek Desa.
- 8) Menjadi pengurus partai politik.
- 9) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.¹⁹

3. Pengertian Perencanaan

Pada hakikatnya perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya) dan apa yang akan dilakukan (intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya). Rangkaian proses kegiatan itu dilaksanakan agar harapan tersebut dapat terwujud menjadi kenyataan dimasa yang akan datang.

Friedman mendefinisikan “Perencanaan sebagai cara berfikir mengatasi permasalahan sosial ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program”.²⁰

Perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat

¹⁹ UU. Op.cit

²⁰ Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 4

diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan social dan ekonomi (kedua hal tersebut termasuk dalam tujuan pembangunan) harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

M. Fakry mengemukakan bahwa:

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan itu dapat pula diberi arti sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. Perencanaan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memadukan antara cita-cita nasional dan resources yang tersedia yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.²¹

Arsyad berpendapat bahwa ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu:

- a. Merencanakan berarti memilih
- b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
- c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
- d. Perencanaan berorientasi ke masa depan.²²

Newman memberikan definisi “Perencanaan sebagai keputusan apa yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan”.²³

Atmusudirdjo memberikan definisi “perencanaan adalah perhitungan dan pentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa, dan bagaimana”.²⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, serta

²¹ Syaefuddin, Udin. 2007. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 4-5

²² Robinson. Op.cit. hal 5

²³ Mappaenre. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Administrasi dan Manajmen*. Makassar: UNM. Hal 89

²⁴ Syaefuddin.op.cit. hal 4

cara untuk mengalokasikan sumber daya alat untuk mencapai tujuan, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta tercapainya tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif, dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana.

4. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses pelaksanaan dari kegiatan melakukan suatu perubahan yang lebih baik sebagai aplikasi dari proses perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Riyadi mengemukakan bahwa “Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu”.²⁵

Mardikanto mengemukakan bahwa :

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.²⁶

Selain itu, Soetomo menyatakan :

Pembangunan juga tidak terlepas dari pada sumber daya, baik dari sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Salah satu sumber daya pembangunan yang cukup penting yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

²⁵ Theresia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. Hal 2

²⁶ Ibid. p. 6

adalah SDA. Sedangkan SDM merupakan salah satu potensi pembangunan yang berasal dari unsur manusia dengan segala aktifitasnya.²⁷

Siagian memberikan ide-ide pokok mengenai definisi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan merupakan suatu proses.
- 2) Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan.
- 3) Pembangunan dilakukan secara berencana, yang berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- 4) Pembangunan mengarah pada modernitas.
- 5) Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimension.²⁸

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan ke arah yang positif.

5. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset atau penelitian, dikarenakan instrument yang digunakan adalah metode-metode riset. Kegiatannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang dilapangan sebagai data penting dan utama yang akan di pakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Dalam setiap proyek pembangunan, perencanaan merupakan tahapan awal. Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan/ dasar bagi

²⁷ Ibid. p. 193

²⁸ Siagian. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Cetakan ke-9. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal.4

pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif dan aplikatif.

Menurut M.L. Jhingan dalam Sjafrizal “Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula”.²⁹

Sjafrizal mengemukakan bahwa “secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan”. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat member hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Suatu konsep perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus

²⁹ Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 25

memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, dll.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan 4 tahapan perencanaan pembangunan nasional, meliputi 1) Penyusunan rencana, 2) Penetapan rencana, 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, merupakan tinjauan awal sebelum memulai suatu kebijakan dengan memperkirakan akibat dan keuntungan pada masa yang akan datang.
- 2) Penetapan rencana, tahapan ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.
- 3) Pengendalian dan pelaksanaan rencana, Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan rencana, suatu rencana tentunya harus yang benar-benar sesuai dengan kesepakatan awal, jangan sampai menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan bagi yang lainnya.

- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.³⁰

Perencanaan pembangunan hendaknya bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam artian mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta di lapangan. Dalam hubungannya dengan suatu desa sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan desa yang baik. Jadi, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

6. Pentingnya Perencanaan dalam Pembangunan

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Disamping itu kemerdekaan suatu bangsa seringkali meningkatkan perasaan sebagai warga

³⁰ UU No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

masyarakat dan bangsa. Semua hal tersebut menjadi beban yang berat bagi elit pemerintahan untuk memimpin, mengarahkan, dan membina kegiatan-kegiatan yang mendorong proses pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan itu menjadi penting.

Pentingnya perencanaan pembangunan menjadi bagian yang tidak terhindarkan sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan yang akan secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati. Perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggungjawab atas berbagai pilihan-pilihan. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat member hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

B. Kerangka Konseptual

Setiap kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah perlu dilandasi oleh kerangka konseptual agar penelitian dan penulisan laporan penelitian tersebut dapat tersusun secara sistematis. Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan bahwa BPD sangat berperan penting dalam proses perencanaan pembangunan karena perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau

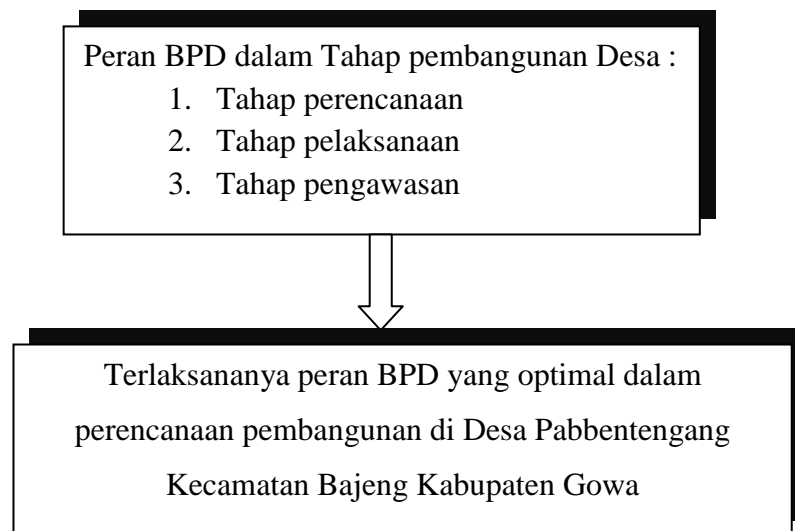
mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 menyebutkan bahwa tahapan pembangunan desa meliputi :

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap pengawasan.³¹

Berikut pembahasan kerangka konseptual untuk lebih memperjelas pembahasan yang akan digambarkan dalam bentuk bagan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Bagan Kerangka Konseptual Peran BPD yang optimal dalam perencanaan pembangunan di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

³¹ UU No 6 Tahun 2014

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dasar penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan memilih data dalam ruang lingkup tertentu.

Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui atau fenomena yang baru sedikit diketahui. Selain itu metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Sugiyono mendefinisikan “penelitian deskriptif adalah Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya”.³² Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan.

³² Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hal. 11

Untuk mengkaji perspektif partisipan, penulis dapat menggunakan berbagai strategi, strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dan lain-lain.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Penulis memilih lokasi tersebut karena melihat adanya suatu permasalahan dari Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Tahapan pembangunan desa dapat ditinjau dari 3 tahapan yakni : (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap pengawasan.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa diambil untuk mengetahui bagaimana pembangunan desa yang baik. Untuk mengukur terlaksananya perencanaan-perencanaan pembangunan yang baik, memiliki 3 tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Tahap perencanaan, sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, serta cara untuk mengalokasikan sumber daya alat untuk mencapai tujuan, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang

hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta tercapainya tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif, dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

- b. Tahap pelaksanaan, tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan dapat pula diartikan sebagai penerapan. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- c. Tahap pengawasan, kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, mencocokkan serta membandingkan antara pelaksanaan kerja dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga mempermudah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Pengawasan dimaksudkan untuk menjaga agar pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

D. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian yaitu:

1. Tahap Perencanaan Penelitian

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan diantaranya ialah:

a. Mengidentifikasi masalah/Mencari permasalahan:

Tahap ini, peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang hendak diteliti tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

b. Merumuskan masalah:

Dimana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti. Masalah atau fenomena yang terdapat di lapangan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa lalu kemudian dirumuskan dan kemudian dijadikan dasar untuk mengadakan penelitian.

c. Mengadakan studi pendahuluan:

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat diketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Penulis melakukan observasi langsung di kantor Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan menganalisis kembali tentang masalah atau fenomena yang terjadi di lapangan.

d. Menyusun rencana penelitian:

Tahap ini merupakan pedoman selama melaksanakan penelitian. Sebagai suatu pola perencanaan harus dapat mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Diantara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian diantaranya:

a. Pengumpulan Data

Kegiatan ini harus didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian.

b. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga teknik analisi data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

E. Sumber Data

Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data yang berkenaan dengan data yang masih memerlukan pengolahan dan analisis yang berkaitan dengan informasi yang relevan dari penggunaan tersebut.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar data yang ditetapkan.

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan deskripsi fokus penelitian peran BPD dalam perencanaan pembangunan di desa pabbenteng kecamatan bajeng kabupaten gowa.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono mengemukakan bahwa sampel sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi dihayatinya.
- 2) Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- 3) Mereka yang mempunyai waktu untuk dimintai informasi.
- 4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- 5) Mereka yang pada mulanya tergolong sebagai orang yang “cukup asing” akan peneliti sehingga lebih lanjut menggairahkan untuk dijadikan sebagai guru atau narasumber.³³

Berdasarkan kriteria yang dikemukakan di atas, maka terdapat 3 orang yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni :

- a. Kepala Desa
- b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Tokoh masyarakat

³³ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 221

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang diperoleh bukan dari sumber asli atau pertama tetapi bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan secara langsung terhadap suatu hal untuk melihat kondisi objektif yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama dengan mengacu tentang Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya apabila di dukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada yang mengenai dengan Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh data terkumpul, dan dikelompokkan berdasarkan variable dan jenis responden sesuai dengan metode penelitian.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian yang digunakan adalah Model Analisis Interaktif, Miles & Huberman, model analisis interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁴ Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan rinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi dengan rumus pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi

³⁴ Ibid. p 246

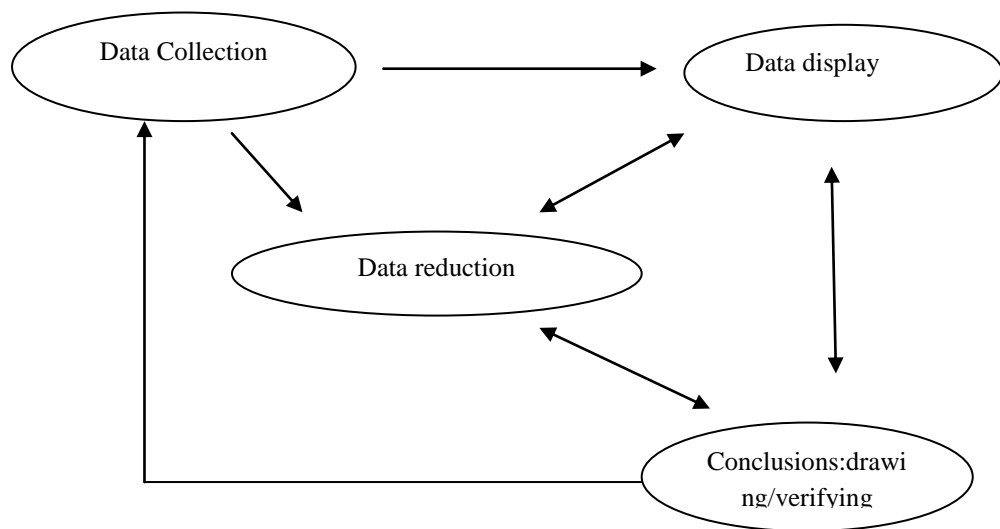
data hasil penelitian. Proses reduksi data ini terus berlangsung hingga laporan akhir penelitian lengkap dapat tersusun. Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian-bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan untuk Penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan verifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah dan disisihkan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan permasalahan yang dihadapi termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada waktu data direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentative sampai kepada kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian.



Gambar 2. Komponen dalam analisis data menurut Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2014:247)

H. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang penulis ambil dalam pengabsahan data adalah teknik triangulasi. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu:

1) Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari sumber tersebut, tidak bisa diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member chek) dengan ketiga sumber data tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara , observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.³⁵

³⁵ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hal. 273

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Secara administrasi Desa Pabbentengang terletak di Wilayah timur Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, yang merupakan salah satu Desa dari 10 Desa dan 4 Kelurahan. Wilayah Desa Pabbentengang secara administrasi dibatasi oleh wilayah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa tetangga.

a. Demografi/ Batas Desa

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Paraikatte dan Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga.
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Lassang Kabupaten Takalar
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Maccini Baji
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Towata Kabupaten Takalar

b. Jarak dari ibu Kota Kecamatan 7 km

Jarak dari ibu Kota Kabupaten 20 km

Jarak dari ibu Kota Provinsi 30 km

c. Luas Wilayah Desa dalam Tata Guna Lahan

Luas Wilayah Desa Pabbentengang 570,33 Ha terdiri dari :

- Pemukiman : 99,33 Ha

- Persawahan : 392,06 Ha
- Sawah : 58,54 Ha
- Perkebunan : 20,00 Ha

2. Kondisi dan Ciri Geografi Wilayah

Wilayah Desa Pabbentengang secara umum mempunyai ciri geografi berupa daerah dataran rendah dengan hamparan persawahan dan perkebunan yang dijadikan sebagai lahan pertanian dan penggembalaan ternak sapi, Desa Pabbentengang juga merupakan daerah aliran irigasi Bissua.

Selain itu, kondisi alam Desa Pabbentengang yang merupakan daerah dataran rendah dengan panorama alam yang masih asri. Oleh karena itu, Desa Pabbentengang sangat cocok sebagai tempat pertanian dan perkebunan.

Di sebelah selatan wilayah Pa'bentengang terdapat hamparan tambang golongan C diantaranya pasir, sirtu, dan batu kali. Di setiap dusun terdapat lubang bekas galian tambang sirtu dan batu bata sangat cocok dengan pengembangan ikan air tawar. Di sebelah timur Dusun Lanra-Lanra dan Paukiri terdapat puluhan hektar hamparan rumput ilalang (lahan tidur) yang sangat cocok dijadikan sebagai tempat penggembalaan ternak, dan sebagai lahan untuk ditanami tebu (bahan baku pembuatan gula pasir). Di Desa Pabbentengang secara umum kondisi tanahnya gembur dan subur semua jenis tanaman bisa tumbuh baik padi, palawija maupun tanaman jangka panjang.

Pada Dusun Sunggumanai terdapat TPA (Tempat Pembuangan Akhir sampah Kab.Gowa) di mana TPA banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari nafkah. Di Dusun Sunggumanai juga terdapat Cadika (Cabang Pendidikan

Pramuka/Tempat perkemahan) yang mempunyai lahan yang luas, selain dimanfaatkan sebagai tempat perkemahan juga merupakan lapangan Desa Pabbentengang.

3. Sosial Ekonomi Masyarakat

Penduduk Desa Pabbentengang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani sumber daya alam yang dihasilkan seperti padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang panjang, ubi kayu, dan ubi jalar.

Bertani merupakan pekerjaan pokok bagi sebagian besar masyarakat, dan mempunyai pekerjaan sampingan pada sector peternakan, pengrajin batu bata, dan usaha warung. Petani juga ada 2 yaitu petani pemilik dan petani penggarap di mana sebagian besar masyarakat petani memasarkan hasil pertanian kepada pedagang eceran (pagandeng) serta sebagian kecil masyarakat Desa Pabbentengang ada yang bergelut di bidang Pemerintahan (PNS).

Adapun jenis mata pencaharian pokok masyarakat Desa Pabbentengang berdasarkan penjabakan terdiri dari : PNS, pengusaha, pedagang, petani/peternak, karyawan swasta, tukang ojek, tukang bangunan, supir, buruh tani, buruh bangunan, pegawai/guru honor.

4. Iklim dan Curah Hujan

Desa Pabbentengang mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan yang biasanya musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan November sampai Maret. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu bulan April-Mei dan Oktober-November dengan curah hujan tertinggi

diperkirakan bulan Januari yang mencapai rata-rata 1.182 mm. Sedangkan curah hujan terendah pada bulan Agustus-September yang biasanya dikatakan hampir tidak ada hujan. Suhu rata-rata pertahun adalah 32 °C.

5. Visi dan Misi Desa Pabbentengang

a. Visi

Setelah melakukan survey asset atau potensi setiap dusun di Desa Pabbentengang serta menganalisa dan melakukan identifikasi masalah setiap dusun maka secara umum Desa Pabbentengang melalui musyawarah di tingkat Desa maka lahirlah visi Desa Pabbentengang yaitu :

“Masyarakat Desa Pabbentengang melestarikan nilai-nilai yang bersumber dari agama dan budaya suku Makassar. Harmonisasi hubungan antar warga dengan pemerintah desa yang senantiasa menjaga keutuhan, kebersamaan dan kekeluargaan”.

b. Misi

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki Desa Pabbentengang, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :

➤ Bidang Pendidikan

1. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tenaga terkecuali.
2. Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilkan insan intelektual, insan inovatif, dan insan entrepreneur.

3. Membangun dan mendorong terwujudnya keterampilan serta keahlian baik formal maupun informal yang berbasis dan mengembangkan sector pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

➤ Bidang Sarana dan Prasarana

Membangun dan mendorong pembangunan infrastruktur yang menunjang segala bidang usaha terutama pada sector pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

➤ Bidang Perekonomian

Membangun dan mendorong untuk mengembangkan usaha-usaha sector pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik pada tahapan produksi maupun pengolahan hasilnya sampai pada pemasarannya.

➤ Bidang Sosial Budaya

1. Mengupayakan terciptanya pelayanan kesehatan yang memadai
2. Peningkatan kapasitas pemerintah Desa, Aparat, BPD, dan Kader-kader.

➤ Bidang Pertanian

Meningkatkan hasil mutu produksi dan pengelolaan usaha di bidang pertanian padi dan palawija.

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung antara penulis dengan beberapa informan yakni Kepala Desa (Ahmad Lau), Ketua BPD (Muhtar Muhsin), dan anggota masyarakat (Jamaluddin) serta data-data lain yang dapat mendukung penelitian ini.

Data yang penulis sajikan berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Wawancara dilakukan kepada kepala desa Pabbentengang (Ahmad Lau), ketua BPD (Muhtar Muhsin), dan anggota masyarakat (Jamaluddin).

Data wawancara yang diperoleh terkait dengan peran BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Pabbentengang yang kemudian diukur berdasarkan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa membutuhkan partisipasi pemerintah, BPD, dan masyarakat. Partisipasi mereka dalam pembangunan desa diartikan sebagai alat guna memperoleh informasi tentang kondisi dan kebutuhan desanya. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan sangat berpartisipasi, hal ini dapat dilihat dengan antusiasnya menghadiri kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan pada hari senin 13 Juni 2016 yang dapat dilihat pada lampiran VI yaitu daftar hadir Musrenbangdes Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2016.

Keterkaitan BPD dalam menyusun perencanaan pembangunan yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Lau (wawancara pada hari Kamis 16 Juni 2016) mengemukakan bahwa “Iya BPD dilibatkan dalam proses perencanaan

pembangunan karena BPD lah yang mengesahkan atau menyetujui setiap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Muhtar Muhsin (wawancara pada hari Senin 20 Juni 2016) bahwa “Iya, sebab berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satu organisasi yang merupakan mitra Kepala Desa adalah BPD. Oleh karena itu keterlibatan BPD dalam proses perencanaan pembangunan sangat erat kaitannya”.

Keterlibatan BPD dalam perencanaan pembangunan juga diungkapkan oleh Bapak Jamaluddin (wawancara pada hari jum’at 24 Juni 2016) mengemukakan bahwa “Pada saat Musrenbangdes BPD juga turut hadir”.

Pada tahap perencanaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berdasarkan hasil observasi dan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa BPD sangat berperan penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbangdes), ini dapat dilihat dari kehadiran anggota BPD mencapai 100 % pada saat Musrenbangdes.

Selain keterlibatan BPD dalam proses perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi BPD Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa adalah seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad Lau (wawancara pada hari Kamis 16 Juni 2016) adalah “Mengesahkan, menyepakati, dan mengawasi setiap pembangunan desa serta BPD sebagai perwakilan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan”.

Bapak Jamaluddin (wawancara pada hari jum'at 24 Juni 2016) mengemukakan bahwa “BPD sebagai perwakilan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah baik dari segi pelayanan maupun pembangunan”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua BPD, bapak Muhtar Muhsin (wawancara pada hari Senin 20 juni 2016), bahwa ““Tugas dan fungsi BPD adalah sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat dan memajukan pembangunan di Desa Pabbentengang dan juga merupakan pengawas Desa dalam pelaksanaan peraturan desa”.

Dengan demikian melihat dari jawaban ketiga informan, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi BPD di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa adalah sebagai perwakilan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah khususnya dibidang pembangunan.

Selain tugas dan fungsi BPD di Desa Pabbentengang yang telah diungkapkan di atas, BPD juga menyusun suatu perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Lau (wawancara pada hari Jumat 10 Juni 2016), “BPD dalam menyusun rencana pembangunan melalui rapat yang dilaksanakan di Desa yang menghadirkan beberapa perwakilan masyarakat dari setiap dusun yang ada di desa dan disitulah di setiap perwakilan masyarakat akan menyampaikan usulan atau rencana pembangunan yang akan dilaksanakan yang telah dimusyawarahkan sebelumnya di setiap dusun (Musyawarah Dusun)”.

Bapak Muhtar Muhsin (wawancara pada hari Jumat 13 Juni 2016) mengemukakan bahwa “Pertemuan yang dilakukan di Desa yang hadir ada

beberapa warga setiap dusun yang datang untuk menyampaikan masukan/usulan pembangunan Desa”.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dapat dikatakan efektif, dapat dilihat dari keterlibatan BPD dalam proses perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi BPD, dan cara BPD menyusun suatu perencanaan sudah berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan memanfaatkan kearifan local dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan, adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Menurut Bapak Ahmad Lau (wawancara pada hari Kamis 16 Juni 2016), mengemukakan bahwa “Pelaksanaan pembangunan di Desa harus melibatkan masyarakat karena setiap pembangunan merupakan usulan dari masyarakat itu sendiri dan juga masyarakat jugalah yang akan menikmati pembangunan yang telah dilaksanakan”. Hal yang sama dengan Bapak Jamaluddin (wawancara pada hari Jum’at 24 Juni 2016), mengatakan bahwa “BPD dan masyarakat dilibatkan khususnya dalam kegiatan fisik”.

Pelaksanaan pembangunan di desa Pabbenteng belum berjalan sesuai dengan harapan. Menurut Bapak Muhtar Muhsin (wawancara pada hari Senin 20

Juni 2016) mengemukakan bahwa, “Belum, karena keterbatasan aparat yang berkompoten, keterbatasan dana dan anggaran yang masih menggunakan skala prioritas”.

Menyangkut masalah pelaksanaan pembangunan sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak, Bapak Ahmad Lau (wawancara pada hari Kamis 16 Juni 2016), “Pelaksanaan pembangunan desa belum sesuai yang diharapkan akan tetapi sudah mulai meningkat dari tahun sebelumnya karena keterbatasan anggaran juga menjadi faktor dalam pelaksanaan pembangunan”

Bapak Muhtar Muhsin (wawancara pada hari Senin 20 Juni 2016), “Permasalahannya yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh Anggota BPD”. Bapak Jamaluddin (wawancara pada hari jum’at 24 Juni 2016) “Masalahnya yaitu keterbatasan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pembangunan di Desa Pabbentengang belum sesuai yang diharapkan hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya membiayai program-program pembangunan yang diharapkan, maka dalam hal ini peran BPD belum optimal dalam melaksanakan pembangunan, karena belum mampu sepenuhnya memperjuangkan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat.

c. Tahap Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses memperhatikan dan mengawasi jalannya setiap proses-proses pembangunan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Desa Pabbentengang yang didasarkan pada

adanya penetapan ukuran kerja dan pengambilan tindakan guna mendukung pencapaian hasil.

Tahap pengawasan merupakan tahapan ketiga dalam perencanaan pembangunan di mana setiap elemen yang mempunyai tugas dalam perencanaan pembangunan harus mengawasi berjalannya pembangunan yang ada di desa agar suatu pembangunan bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan bersama.

Bapak Ahmad Lau (wawancara pada hari Kamis 16 Juni 2016) bahwa “ Pengawasan BPD tidak terlalu maksimal dalam mengawasi pembangunan karena hanya satu dua orang saja”. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Muhtar Muhsin (wawancara pada hari senin 20 Juni 2016) bahwa “ dalam melakukan evaluasi pembangunan tidak semuanya anggota BPD yang aktif, hanya satu dua orang yang mengkritisi sepintas saja”.

Bapak Jamaluddin (wawancara pada hari jum'at 24 Juni 2016) bahwa “ dalam pengawasan yang dilakukan BPD dalam terhadap pembangunan desa itu pengawasannya secara tidak langsung.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengawasan pembangunan di Desa Pabbentengang belum maksimal karena pengawasan yang dilakukan masih kurang aktif terutama anggota BPD yang hanya satu atau dua orang saja yang turun kelapangan, ini disebabkan karena anggota BPD memiliki pekerjaan lain selain anggota BPD yang terkadang kegiatan BPD bertepatan dengan waktu kerja.

C. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Untuk melihat titik pokok dalam penelitian ini dapat ditinjau dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan.

1. Tahap Perencanaan

Keterlibatan pemerintah, BPD, dan masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan bukan hanya sebatas pengertian ikut serta secara fisik, melainkan keterlibatan yang memungkinkan mereka untuk melakukan penilaian terhadap masalah serta potensi yang terdapat pada lingkungannya, untuk kemudian mereka memikirkan dan menentukan kegiatan yang mereka butuhkan dalam rangka melakukan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta BPD dan masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*).

Tahap perencanaan merupakan tahap yang awal dalam penyusunan suatu pembangunan yang akan dilakukan karena tanpa suatu perencanaan maka suatu pembangunan tidak akan ada. Tahap perencanaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dapat dikatakan sudah efektif karena keterlibatan BPD dalam proses perencanaan pembangunan, tugas

dan fungsi BPD, dan cara BPD menyusun suatu perencanaan sudah berjalan dengan baik.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan dapat berarti proses pengimplementasian pembangunan yang didasarkan pada sesuatu yang telah dirumuskan dan ditetapkan secara bersama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang makmur dan sejahtera. Keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sangatlah menentukan keberhasilan pembangunan, oleh karena itu bagaimanapun potensi yang dimiliki jika aparat pelaksana ataupun BPD kurang memahami keterpaduan pembangunan, dengan sendirinya tujuan pembangunan desa juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Tahap pelaksanaan merupakan sebuah tahap dimana suatu pembangunan itu dilaksanakan sehingga semua yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan harus tersedia baik dari segi materi maupun SDM yang menunjang. Proses pelaksanaan pembangunan di Desa Pabbentengang belum sesuai yang diharapkan karena dapat terbengkalai oleh dana, namun pembangunan yang berjalan sudah demokratis dan melibatkan masyarakat umum.

3. Tahap Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses memperhatikan dan mengawasi jalannya setiap proses-proses pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan BPD desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten

Gowa yang didasarkan pada adanya penetapan ukuran kerja dan pengambilan tindakan guna mendukung pencapaian hasil pembangunan.

Pengawasan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, mencocokkan serta membandingkan antara pelaksanaan kerja dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga mempermudah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Pengawasan dimaksudkan untuk menjaga agar pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tahap pengawasan merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu perencanaan pembangunan yang telah dilakukan apakah sudah berjalan dengan apa yang kita inginkan bersama sehingga pembangunan itu bisa kita nikmati dan mememliharanya bersama. Proses pelaksanaan pengawasan pembangunan di Desa Pabbenteng belum maksimal karena pengawasan yang dilakukan masih kurang aktif terutama anggota BPD yang hanya satu atau dua orang saja yang turun kelapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan bahwa : peran BPD dalam tahap (1) perencanaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sudah dikatakan berjalan dengan baik, karena dapat dilihat dari proses keterlibatan BPD serta masyarakat dalam merumuskan suatu perencanaan pembangunan melalui musyawarah. (2) tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa belum bisa dikatakan efektif karena kurangnya BPD yang mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai anggota BPD, pembangunan belum sesuai yang diharapkan karena kurangnya SDM dari anggota BPD dan terbatasnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah karena masih menggunakan skala prioritas. (3) BPD dalam tahap pengawasan pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa belum efektif karena pengawasan yang dilakukan masih kurang aktif terutama anggota BPD yang hanya satu atau dua orang saja yang turun kelapangan meninjau pembangunan Desa.

B. Implikasi

Hasil penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa merupakan bukti ilmiah akan pentingnya peran BPD dalam perencanaan

pembangunan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang diawali dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sehingga tercipta pembangunan yang efektif dan efisien serta dapat memberi hasil yang optimal.

C. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis dapat merekomendasikan saran yaitu :

1. BPD diharapkan dapat mempertahankan kerjasama dengan Pemerintah maupun masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Sebaiknya BPD dan anggotanya dapat lebih mengetahui tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil dari masyarakat serta mampu meningkatkan dan mengembangkan SDM yang dimilikinya dalam melaksanakan pembangunan.
3. BPD diharapkan dapat lebih aktif melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan juga aktif dalam mengawasi, mengevaluasi setiap pembangunan yang dilaksanakan sehingga setiap pembangunan yang dilaksanakan bisa dinikmati dan dimanfaatkan serta dipelihara baik BPD, Pemerintah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mappaenre, Ahmad. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dan Manajmen*, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Penerbit Erlangga.
- Palaguna.H.Z.B.2002. *Orientasi Penguatan Otonomi Desa*. Makassar: Tim Pembina & Fasilitator penguatan OtonomiDesa Propinsi Sulawesi Selatan.
- Siagian. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Cetakan ke-9. Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaefudin, Udin.2007. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Theresia, Aprilia. 2014. *Pembangunan Berbasis Mayarakat*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wibowo. 2014. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Widjaja. 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Skripsi

- Samsuria Alvi. 2015. *Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Cina Kabupaten Bone*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Alam Syah. 2014. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan (Studi Pembangunan Pelantar Masyarakat Tahun 2012)*. Skripsi tidak diterbitkan. Tanjung Pinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

LAMPIRAN

Lampiran 1

**MATRIKS PENELITIAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA PABBENTENGANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA**

Judul	Rumusan Masalah	Fokus	Sub Fokus	Sumber Data	Metode Penelitian
Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa?	Peran BPD dalam tahap perencanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer, berasal dari informan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa b. Ketua BPD c. Tokoh Masyarakat 2. Data Sekunder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan desain penelitian yaitu kualitatif. 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

1. Perencanaan

- a. Apakah BPD dilibatkan dalam proses Perencanaan Pembangunan?
- b. Apakah tugas dan fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan?
- c. Bagaimanacara BPD menyusun suatu Perencanaan Pembangunan atau bagaimana proses penyusunan rencana itu?

2. Pelaksanaan

- a. Apakah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melibatkan masyarakat atau hanya pengurus BPD saja?
- b. Apakah pelaksanaan Pembangunan sudah berjalan sesuai yang diharapkan?
- c. Apakah BPD dan Pemerintah Desa dalam menyusun Perencanaan Pembangunan telah berjalan secara demokratis?
- d. Apa permasalahan BPD sehingga proses pelaksanaan Pembangunan Desa tidak sesuai dengan Perencanaan?

3. Pengawasan

- a. Bagaimana system pengawasan yang dilakukan BPD dalam Pembangunan Desa?
- b. Apakah BPD ikut melakukan evaluasi, mengkritisi, dan mencermati Pembangunan Desa?
- c. Seperti apakah control atau pengawasan dari BPD terhadap Pembangunan Desa?

Lampiran 3

**Matriks Pedoman Wawancara Mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan
Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa**

Fokus	Sub Fokus	Pertanyaan	Informan
Perencanaan Pembangunan Desa	1. Perencanaan	a. Apakah BPD dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan? b. Apakah tugas dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan? c. Bagaimana cara BPD menyusun suatu perencanaan pembangunan atau bagaimana proses penyusunan rencana itu?	1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Anggota BPD
	2. Pelaksanaan	a. Apakah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melibatkan masyarakat atau hanya pengurus BPD? b. Apakah pelaksanaan pembangunan sudah berjalan sesuai yang diharapkan? c. Apakah BPD dan	

		<p>Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan telah berjalan secara demokratis?</p> <p>d. Apa permasalahan BPD sehingga proses pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan?</p>	
	3. Pengawasan	<p>a. Bagaimana system pengawasan yang dilakukan BPD dalam pembangunan desa?</p> <p>b. Apakah BPD ikut melakukan evaluasi, mengkritisi, dan mencermati pembangunan desa?</p> <p>c. Seperti apakah control atau pengawasan dari BPD terhadap pembangunan desa?</p>	

Lampiran 4

DAFTAR NAMA INFORMAN

A. Informan Pertama

1. Nama : AHMAD LAU
2. Usia : 50 Tahun
3. Pendidikan terakhir : SMA
4. Pekerjaan/jabatan : Plh Kepala Desa Pabbentengang
5. Alamat : Palompong Desa Pabbentengang

B. Informan kedua

1. Nama : MUHTAR MUHSIN DG. LIMPO
2. Usia : 54 Tahun
3. Pendidikan terakhir : S2
4. Pekerjaan/jabatan : Kepala Sekolah
5. Alamat : Jl. Pramuka Cadika Desa Pabbentengang

C. Informan ketiga

1. Nama : JAMALUDDIN MA'JA
2. Usia : 48 Tahun
3. Pendidikan terakhir : SMA
4. Pekerjaan/ jabatan : Petani
5. Alamat : Jl. Pramuka Cadika Desa Pabbentengang

MATRIKS DATA HASIL WAWANCARA

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

No	Sub Fokus	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Penyajian Data	Kesimpulan
1	Perencanaan	Apakah BPD dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan?	Ahmad Lau	Iya BPD dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan karena BPD lah yang mengesahkan atau menyetujui setiap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.	BPD sangat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan.	BPD dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan dengan melalui Musrenbang Desa.	Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai keterlibatan BPD dalam perencanaan pembangunan dapat dikatakan sudah efektif.
			Muhtar Muhsin	Iya, sebab berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satu organisasi yang merupakan mitra Kepala Desa adalah BPD. Oleh karena itu keterlibatan BPD dalam proses perencanaan pembangunan sangat erat kaitannya.			
			Jamaluddin	Iya, karena pada saat rapat perencanaan pembangunan BPD juga ikut hadir.			

2		Apakah tugas dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan ?	Ahmad Lau	Mengesahkan, menyepakati, dan mengawasi setiap pembangunan desa serta BPD sebagai perwakilan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan.	BPD sebagai perwakilan aspirasi masyarakat	Tugas dan fungsi BPD adalah penyalur dan penampung aspirasi masyarakat	Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi BPD adalah menampung dan menerima aspirasi masyarakat baik dalam bidang pembangunan maupun dibidang lainnya.
			Muhtar Muhsin	Tugas dan fungsi BPD adalah sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat dan memajukan pembangunan di Desa dan merupakan pengawas Kepala Desa dalam pelaksanaan peraturan Desa.			
			Jamaluddin	BPD sebagai perwakilan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah baik dari segi pelayanan maupun pembangunan.			
3		Bagaimana cara BPD menyusun suatu perencanaan pembangunan atau bagaimana proses penyusunan rencana itu ?	Ahmad Lau	Melalui rapat yang dilaksanakan di Desa yang menghadirkan beberapa perwakilan masyarakat dari setiap dusun yang ada di desa dan disitulah di setiap perwakilan masyarakat akan menyampaikan usulan atau rencana	Masyarakat diundang ke suatu suatu	Pertemuan atau musyawarah desa dilakukan	Dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan

				pembangunan yang akan dilaksanakan yang telah dimusyawarahkan sebelumnya di setiap dusun (Musyawarah Dusun).	tempat untuk mengikuti rapat atau musyawarah dan menyampaikan usulan rencana pembangunan	untuk mengambil suatu kesimpulan bagaimana pembangunan yang akan datang.	rencana pembangunan itu masyarakat dilibatkan secara langsung dalam musrenbangdes
			Muhtar Muhsin	Pertemuan yang dilakukan di Desa yang hadir beberapa warga setiap dusun yang datang untuk menyampaikan masukan/usulan pembangunan.			
			Jamaluddin	Dalam menyusun perencanaan pembangunan BPD hanya menyetujui.			
4	Pelaksanaan	Apakah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melibatkan masyarakat atau hanya pengurus BPD saja ?	Ahmad Lau	Pembangunan yang ada di desa harus melibatkan masyarakat karena setiap pembangunan merupakan usulan dari masyarakat itu sendiri dan juga masyarakat jugalah yang akan menikmati pembangunan yang telah dilaksanakan.	Rencana pembangunan merupakan usulan dari masyarakat	BPD dan masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pabbentengang	Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Pabbentengang
			Muhtar Muhsin	Pembangunan yang ada di desa melibatkan masyarakat karena setiap pembangunan yang dilakukan itu dari			

				kemauan masyarakat sendiri atau usulan dari masyarakat sendiri			sudah melibatkan masyarakat dan BPD dalam suatu pembangunan,
			Jamaluddin	BPD dan masyarakat dilibatkan khususnya dalam kegiatan fisik.			
5		Apakah pelaksanaan pembangunan sudah berjalan sesuai yang diharapkan ?	Ahmad Lau	Pelaksanaan pembangunan desa belum sesuai yang diharapkan akan tetapi sudah mulai meningkat dari tahun sebelumnya karena keterbatasan anggaran juga menjadi faktor dalam pelaksanaan pembangunan.	Jalanan masih banyak yang rusak (sarana & prasarana) masih belum memadai.	Sarana dan prasarana Desa Pabbenteng belum memadai dan anggarannya masih menggunakan sakala prioritas.	Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
			Muhtar Muhsin	Belum, karena keterbatasan aparat yang berkompeten, keterbatasan dana dan anggaran yang masih menggunakan skala prioritas.			
			Jamaluddin	Belum karena masih banyak yang mau dikerjakan contohnya jalanan jelek, berlubang dll..			
6		Apakah BPD dan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan	Ahmad Lau	Iya sudah berjalan karena dalam suatu pembangunan bukan merupakan kepentingan BPD atau pemerintah itu sendiri	BPD, masyarakat dan Pemdes bekerja sama dalam	Semua rencana pembangunan diputuskan melalui musyawarah.	Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat, BPD dan Pemdes

		pembangunan telah berjalan secara demokratis ?		tetapi pembangunan itu untuk semua masyarakat	pengambilan keputusan perencanaan pembangunan		saling kerjasama dalam perencanaan pembangunan.
			Muhtar Muhsin	Iya, sebab semua yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa harus melalui musyawarah atau mufakat.			
			Jamaluddin	Iya sudah bagus			
7		Apa permasalahan BPD sehingga proses pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan ?	Ahmad Lau	Masalahnya yaitu keterbatasan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah.	Kurangnya anggaran/dana dan keterbatasan SDM dalam pembangunan.	Keterbatasan anggaran dan SDM anggota BPD.	Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan masih terkendala dengan anggaran dan SDM.
			Muhtar Muhsin	Permasalahannya yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh Anggota BPD.			
			Jamaluddin	Kurang dananya.			
8	Pengawasan	Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan BPD dalam pembangunan desa ?	Ahmad Lau	Tidak terlalu maksimal dalam mengawasi pembangunan karena hanya satu dua orang saja.	BPD tidak terlalu mengawasi pelaksanaan pembangunan di Desa.	Kurangnya pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan Desa.	Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran akan tugas dan fungsi BPD dalam pembangunan Desa,
			Muhtar Muhsin	Sistemnya kurang berfungsi sebagaimana mestinya karena apabila dilibatkan maka terlalu banyak koreksinya.			
			Jamaluddin	Tidak mengadakan pengawasan karena anggota BPD mempunyai kesibukan masing-masing.			
9		Apakah BPD ikut melakukan	Ahmad Lau	Iya ikut melakukan akan tetapi hanya anggota BPD	BPD tidak aktif dalam	Dalam mengevaluasi	Hasil wawancara tersebut dapat

		evaluasi, mengkritisi dan mencermati pembangunan desa ?		tertentu seperti ketua dan wakil ketua.	mengevaluasi pembangunan di Desa.	pembangunan Desa BPD masih tidak aktif.	disimpulkan bahwa BPD belum menjalankan tugas dan fungsinya.
			Muhtar Muhsin	Tidak semuanya anggota BPD yang aktif, hanya satu dua orang yang mengkritisi sepintas saja.			
			Jamaluddin	Iya tapi tidak semua anggota BPD.			
10		Seperti apakah kontrol atau pengawasan dari BPD terhadap pembangunan desa ?	Ahmad Lau	Turun langsung ke masyarakat melihat pembangunan yang sedang berjalan.	Masih adanya BPD yang bersifat acuh dalam proses pengawasan pembangunan.	Belum semua anggota BPD melakukan pengawasan terhadap pembangunan.	Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPD masih kurang optimal.
			Muhtar Muhsin	Pengawasannya tidak teratur kadang datang kadang tidak.			
			Jamaluddin	Pengawasannya secara tidak langsung.			


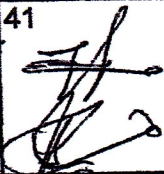
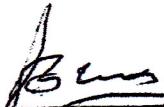

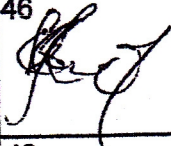
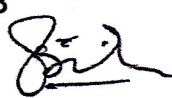
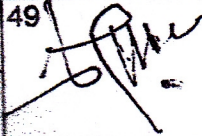





**KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA**

DAFTAR HADIR MUSRENBANG DESA TAHUN 2017

Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2016
Tempat : Kantor Desa Pabbentengang
Waktu : 13.00 - 16.00 wita

No.	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	TAYANG R.	L	BPD	PALOMPONG	1	2
2	ABDULLAH MUNTU	L	KETUA. RK	—		
3	ABD RAHMAN	L	BPD	Palompon	3	4
4	H Ismail HP.	L	Kep. Dusun	Segerbung		
5	MARJANA	P	PKK	KANAWA	5	6
6	SUGI ANTI	P	KADER	KANMATA		
7	MARATENU	P	KADER	Palompong	7	8
8	S. Baji	P	PKK	Palompong Timur		
9	HALIAH	P	KADER	SUNGKUMANA	9	10
10	NURSANI	P	KADER	BUKKARAKI		
11	AISYAH	P	—	PALOMPONG	11	12
12	ASTUTI ARIFIN	P	—	Palompong Timur		
13	Juliana	P	PKK	Sugitanga I	13	14
14	MURHAYATI	P	PKK	Sugitanga I		
15	SUHARSI	P	PKK	Sugitanga 2	15	16
16	RISNA	P	KADER	Sugitanga 2		

	ARWANA OPA	L	IMPUS	PLP TIMUR	TH	
0	MANSUR. Bula	L	---	BulkenRaka		
41	ABD JABBAR ROCA.	L	BPD	BANKRANRKA	41	42
42	NURDI. Sibeli		RT	Palampong		
43	Xheing		R.K	Lampulaka	43	44
44	Bolla		R K	Landra Landa		
45	D. G Mle	L	RK	Stigma	45	46
46	S DA. Sete	L	RT	Palampong		
47	NAHDI. Landa	L	RW	Rannaya	47	48
48	boz Tayang	L	IMPUS	P BUKA		
49	ARTIN. STABA	L	ICABUS	Palampong	49	50
50	MUHTAR. M	L	KETUA BPD	SUNGBUMANA		
51	Salang Manja	L	Angg. KPD	Sungfanga I	51	52
52	JALDI DG BIAJANG	L	ANGGOTA KPD	PAUPIRI		

	S. Sarmah	A.	KADER-	BUKRAH RAKI	18	
18	Futariyiririna		KADUS	Palompong Boang		
19	Syamsul Bahri	L	KADUS	Bukrang Tali	19	20
20	H. Jumangs Tali	L	Kadus	LANGA LANGE		
21	Beth. B.	L	Staf Desa	Sunggumalai	21	22
22	BASRI Seng.	L	Rk-II	Sigitang II		
23	MANA	L	RK	-	23	24
24	S. DE NGENJENG	L	INDUS	Sigitang I		
25	Muhajir Gus.	L	RPO	Sigitang II	25	26
26	Rohas Mung	L	RPO	Pep Boc		
27	Balla		R.K	Landra	27	28
28	Nyaling		R.K.	Can Rando		
29	Prastis Hely			palompong	29	30
30	Mufyriy Tompo		KADUS	Sunggumalai		
31	DARAH GUR		Indus	PAUKIRI	31	32
32	FITRIANA		PKK	BE. RAKI		
33	JUNAEDAH DO. TASI		KADER	PAUKIRI	33	34
34	NURAENI		-	-		
35	H.J. Hafizal		PKK	Ran mangr	35	36
36	Kaharuddin Samr		INDUS	Sigitang II		
37	Sahabudin		Kadus	-	37	38
38	NURSIAM		STAF DESA	sunggumalai		



BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG) T.A. 2017

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Desa Pabbenteng

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang diawali dengan Tahapan Perencanaan di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 13 Juni 2016
Jam : 13-00 - 16-00 Wita
Tempat : Kantor Desa Pabbenteng

Telah diadakan **Musrenbang Desa T.A. 2017** yang dihadiri oleh Perwakilan kelembagaan Desa, wakil-wakil dari masyarakat, Aparatur Desa, Unsur pemerintah BPMPDK Kabupaten Gowa dan para pendamping Desa (TA, PD & PLD), serta unsur lain yang terkait dengan kegiatan ini sebagaimana tercantum dalam *lampiran daftar hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- Pembukaan dilanjutkan sambutan
- Evaluasi & Pemaparan RPJMDes & APBDDes T.A. 2016
- Pemaparan Draft RKPDes T.A. 2017
- Umpan Balik Draft RKPDes 2017
- Pembacaan Berita Acara Musrenbang Desa
- Penandatanganan Berita Acara
-

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : H. MUHTAR LIMPO Dari BPD
Sekretaris dan Notulis : ZULFIKAR Dari PPTKD
Narasumber : 1. MUH. NUR ABUNG MK, SIP Dari BPMPD KAB.
2. AHMAD LAU Dari KEPALA DESA
3. H. MUHTAR LIMPO Dari
4 Dari
5 Dari

Setelah dilakukan Musyawarah Desa terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari pertemuan/musyawarah yaitu :

a. Pada Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Yang telah di laksanakan adalah sebagai berikut :

(Terlampir APBDes)

.....

.....

.....

.....

b. Hasil Musrenbang Desa diputuskan bahwa Usulan T.A. 2017 :

1. Usulan Pek. Drainase Palompong Timur 100 M Dusun. Palompong Timur Sumber Dana APBDES ()
2. Usulan Pek. Pengaspalan Jalan Samping SDI Dusun. Palompong Timur Sumber Dana APBD II ()
3. Usulan Pek. Drainase 150 M Dusun. Lanra-lanra Sumber Dana APBDES ()
4. Usulan Pek. Paving Blok Dusun. Sunggumani Sumber Dana APBDES ()
5. Usulan Kegiatan Kelompok Pemuda Dusun. Pabbenteng Sumber Dana ()
6. Usulan Pelatihan Kelompok Perempuan Dusun. Sumber Dana ()
7. Usulan Pembangunan jalan Desa Dusun. Desa Sumber Dana ()
8. Usulan Pembangunan Saluran Irigasi Dusun. Sugtanga II Sumber Dana ()
9. Usulan Pembuatan jalan paving blok Dusun. Lanra-lanra Sumber Dana APBN ()
10. Usulan Pembangunan penggilangan padi Dusun. 8 dusun Sumber Dana APBDES ()
11. Usulan Pembangunan pasar Desa / Swalayan Dusun. Desa Sumber Dana APBD 5 ()
12. Usulan Pembangunan jembatan Dusun. Desa (3 unit) Sumber Dana APBD 1 ()
13. Usulan Pembangunan Gedung posyandu Dusun. Sumber Dana ()
14. Usulan Dusun. Sumber Dana ()
15. Usulan Dusun. Sumber Dana ()
16. Usulan Dusun. Sumber Dana ()
17. Usulan Dusun. Sumber Dana ()
18. Usulan Dusun. Sumber Dana ()

19. (Terlampir Draft RKPDes T.A. 2017)

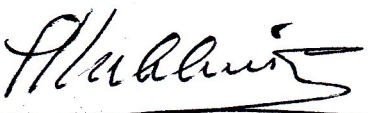
c. Hal-hal lain yang di sepakati :


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggungjawab agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pabbentengang, ... 13 Juni 2016

Pimpinan Rapat

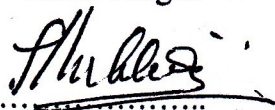
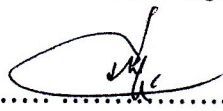
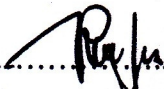
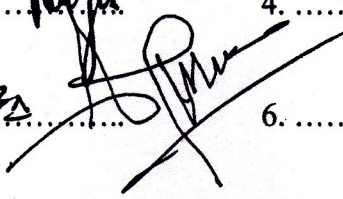
Notulis/Sekretaris


(H. MUHTAR LIMPO)


(ZULFIKAR)

Mengetahui,
KEPALA DESA PABBENTENGANG
KECAMATAN BAJENG
PEMERINTAH KABUPATEN BAJEN
(AHMAD LAU)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

No	Nama	Tanda Tangan	No	Nama	Tanda Tangan
1.	H. MUHTAR LIMPO		2.	TAYAN R	
3.	ABU RAHMAT		4.		
5.	ARIFIN SIDA		6.		
7.			8.		



USUL PROPOSAL PENELITIAN/PENULISAN SKRIPSI

A. IDENTITAS

1. Nama : Yusrina Rahmadhani
2. Tempat/Tgl Lahir : Limbung, 17 Februari 1994
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265542014
4. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
5. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

B. FOKUS PENELITIAN

- ☐ Kebijakan Publik
☐ Pelayanan Publik
☒ Administrasi Pembangunan

C. JUDUL SKRIPSI YANG DIUSULKAN

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
2. Efektifitas Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
3. Pengaruh Kelengkapan Fasilitas Kesehatan terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Pabbenteng.


Makassar, 19 Mei 2015

Diketahui Oleh:

Penasihat Akademik,


Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si
Nip. 19571231 198103 1 039

Mahasiswa yang bersangkutan


Yusrina Rahmadhani
Nim. 1265542014

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si - 42



PERSETUJUAN JUDUL DAN CALON PEMBIMBING

A. IDENTITAS

1. Nama : Yusrina Rahmadhani
2. Tempat/Tgl Lahir : Limbung, 17 Februari 1994
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265542014
4. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
5. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

B. JUDUL SKRIPSI YANG DISETUJUI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PABBENTENGANG
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA.

C. PEMBIMBING YANG DITUNJUK

No.	Nama Pembimbing/NIP	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Fakhri Kahar M.Si NIP. 19571231 198103 1 039	1.
2	Dr. H. Muhammad Guntur M.Si NIP. 19601231 198803 1 001	2.

Makassar, 19 Mei 2015

Ketua Program Studi
Ilmu Adm. Negara FIS UNM

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si
NIP. 19601231 198803 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : FIS_UNM@unm.ac.id

Nomor : 2625/UN36.6/DL/2016

01 Juni 2016

Lamp. : -

Hal : Pengesahan Judul Skripsi
dan Pembimbing

Yth. : Sdr. **Yusrina Rahmadhani**
di Makassar

Stambuk : 1265542014

Berdasarkan surat permohonan Saudara tertanggal 01 Juni 2016 perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat ini, maka dengan ini disampaikan dengan hormat kepada Saudara bahwa rencana skripsi berjudul:

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

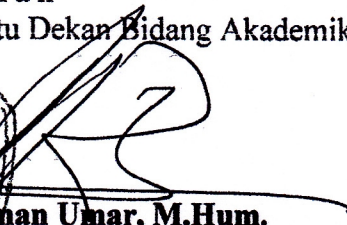
Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si.
2. Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si.

Dapat disetujui dan dinyatakan SAH.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dipergunakan seperlunya.

:

an. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. Firman Umar, M.Hum.
NIP. 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : FIS_UNM@unm.ac.id

Nomor : 2626/UN36.6/PI/2016

01 Juni 2016

Lamp. : -

Hal : Permintaan Izin Melaksanakan
Penelitian

Yth. : **GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan

Dimohon dengan hormat kiranya kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini, dapat diberikan izin mengadakan penelitian di: **Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa** dalam rangka penulisan skripsi.

Nama : **Yusrina Rahmadhani**

Stambuk : 1266542014

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si.

2. Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si.

Masalah yang diteliti :

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



an. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. Firman Umar, M.Hum.
NIP 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 7146/S.01.P/P2T/06/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ilmu Sosial UNM Makassar Nomor : 2626/UN36.6/PI/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : YUSRINA RAHMADHANI
Nomor Pokok : 1266542014
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. A. Pangerang Pettarani Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PABBENTENGANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgt. **06 Juni s/d 06 Juli 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 03 Juni 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ilmu Sosial UNM Makassar;
2. Perlinggal.

SIMAP BKPM 03-06-2016





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 8 Juni 2016

K e p a d a

Nomor : 070/1225/BKB.P/2016

Yth. Camat Bajeng

Lamp : -

Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 7146/S.01.P/P2T/06/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Yusrina Rahmadhani**
Tempat/Tanggal Lahir : Limbung, 17 Februari 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komp. Amalia Residence A1/3 Palangga

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat saudara yang berjudul : ***“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PABBENTENGANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA”***.

Selama : 06 Juni s/d 06 Juli 2016

Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,

KAMALUDDIN SERANG, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 19590205 198003 1 013

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ilmu Sosial UNM Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal,-



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAJENG

Jl. Mesjid Raya No. 29 Limbung No. Telp (0411) 842037

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 31 / Um

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas Kab. Gowa No : 070 617/ BKB / 2009 Tanggal 31 Juli 2009 tentang Izin Rekomendasi penelitian, maka kepada yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **Yusrina Rahmadhani**
Tempat / Tanggal lahir : Limbung, 17 Februari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komp. Amalia Residence A1/3 Pallangga

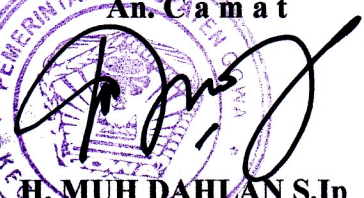
Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PABBENTENGANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA** “.

Selama : 06 Juni s/d 06 Juni 2016

Pengikut Peserta : Tidak ada

Demikian izin rekomendasi/ penelitian ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limbung 13 Juni 2016

An. Camat

H. MUH DAHLAN S.Ip
Nip. 19640701 198611 1 003

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Gowa
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAJENG
DESA PABBENTENGANG

SURAT KETERANGAN
Nomor : *23* /DSP/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Lau

Jabatan : Plh. Kepala Desa Pabbentengang

Dengan ini menyatakan :

Nama : Yusrina Rahmadhani

NIM : 1265542014

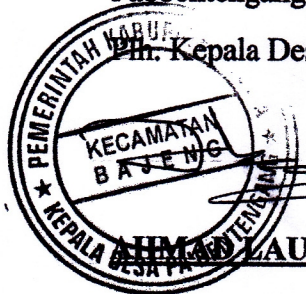
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Benar telah selesai mengadakan penelitian di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada tanggal 6 Juni-6 Juli dengan judul penelitian : **'Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa'**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pabbentengang, 11 Juli 2016

Plh. Kepala Desa Pabbentengang



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

***PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Musyawarah Desa

Pasal 54

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
 - (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- :

Bagian Ketujuh Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 59

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan

- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 65

(1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan

Penghasilan Pemerintah Desa

- b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
 - (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
 - (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
 - (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Pembangunan Desa

Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan perjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 81

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 83

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Tampak depan Kantor Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa



Gambar 2. Proses wawancara dengan Kepala Desa Pabbentengang



Gambar 3. Pimpinan rapat Musrenbangdes Tahun 2017 yang dihadiri oleh Perwakilan dari Kabupaten, Kecamatan, Kepala Desa, Ketua BPD dan Pendamping Desa



Gambar 4. Suasana peserta rapat peserta musrenbangdes yang menyimak/membaca draft program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.



Gambar 5. Pengukuran perencanaan pengerjaan drainase Dusun Palompong yang dilakukan oleh tenaga tehnik Desa dan anggota BPD.



Gambar 6. Salah satu pelaksanaan pekerjaan jalan paving blok di Dusun Sunggumanai yang dibiayai oleh Dana Desa.

RIWAYAT HIDUP



Yusrina Rahmadhani, lahir di Limbung tanggal 17 Februari 1994, merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan H. Muhtar Muhsin, S.Pd, M.Si dan Hj. Hafiah, S.Pdi. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2000 di SD Inpres Bukkangraki Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bajeng dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bajeng dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara.